

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENGURUSAN MUI KOTA SURABAYA

(1975 – 1992)

A. Periode I (1975-1982)

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia di daerah tingkat II kotamadya Surabaya atas prakarsa Bapak Soeparno selaku bapak Walikota pada waktu itu. pada tahun 1978 melaksanakan pelantikan yang dilaksanakan di balai pemuda. Agar kegiatan MUI bisa efisien, maka kantor yang ditempati oleh MUI kota Surabaya untuk sementara terletak di salah satu ruangan di Balai Pemuda. Kemudian pindah ke kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya tepatnya Jl. Genteng Kali No. 29. Proses pertumbuhan MUI tidak bisa dilepaskan dengan peran KA KAN SOSPOL dan KA KESRA .

Semangatnya para MUI kota Surabaya pada periode ini dapat dibuktikan dengan adanya peran MUI dalam menyelenggarakan panitia untuk menyambut abad XV Hijriyah yang merupakan abad kebangkitan umat Islam pada tahun Hijriyah 1401 atau tahun 1979.

Pada waktu itu anggotanya belum banyak dengan kantor yang tetap, dana juga belum jelas sehingga sampai tahun 1982 belum banyak yang diperbuat. Namun pada periode ini semangat tidak pernah habis dan jika digerakkan kembali pada masa sekarang, nampaknya sukar.

Pada periode awal, Majelis Ulama Indonesia kota Surabaya disambut baik oleh pemerintah, Departemen Agama. Begitu pula sebaliknya, hal tersebut ditandai dengan adanya P.4. dan ajaran Islam yang telah dikeluarkan pemerintah disambut dengan tangan terbuka oleh MUI. MUI sendiri bertekad menyebarluaskan Pancasila dan P.4. dan Garis-Garis Besar Haluan Negara pada umat.

B. Periode II (1982 – 1987)

Periode II ditandai dengan adanya musyawarah daerah II pada tanggal 24-25 Nopember 1982. Pada periode ini MUI menunjukkan wajah dan bentuk yang agak nyata sebagai organisasi penghubung yang aktif dan bersifat non operatif.

Pada periode ini MUI telah mempunyai kantor di bawah naungan masjid al-Muhajirin yang sampai sekarang masih tetap, di situ dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang relatif lumayan dan tenaga kerja yang cukup lumayan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Dalam periode ini disebut “Perkenalan” dikarenakan sebagian besar bersifat silaturahmi dan perkenalan untuk mendapatkan pengakuan masyarakat, dan sifatnya belum dapat dikatakan “Berorientasi pada program” karena masih memerlukan pendekatan pada masyarakat.

Pada periode I – II (1975-1985) dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi organisasi, penataan organisasi yang mantap dan pembagian tugas serta program yang jelas, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh umat

khususnya warga kota Surabaya. MUI kota Surabaya di sini tidak membuat program kerja seperti organisasi masyarakat pada umumnya, akan tetapi di sini bekerja ketika masyarakat dihadapkan sebuah masalah yang susah untuk dipecahkan.

Di Indonesia, sejak masuknya agama Islam, hukum Islam telah dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, dan dalam penerapannya telah dilakukan ijtihad-ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi.³⁵

Restrukturisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah berakibat terjadinya diferensiasi posisi Kyai dalam politik dan akibat lain yang menyertainya, antara lain konfigurasi baru kemudian komunikasi antara kyai dengan pemerintah maupun Kyai dengan umatnya. Sebelum lahirnya kebijakan itu, pada umumnya para Kyai berada pada posisi tunggal yaitu berada pada organisasi keagamaan atau politik Islam, sebab identitas sebagai pejuang Islam hanya akan diberikan kepada orang yang memimpin organisasi atau partai yang berasaskan agama.³⁶

Hubungan antara Majelis Ulama Indonesia dengan organisasi atau lembaga Islam bersifat konsultatif dan kemitraan. Konsultatif bersifat komunikasi dua arah, karena berlangsung dengan bentuk interaksi antara pemimpin dan

³⁵ Abdurrahman Wahid, dkk., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 242.

³⁶ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 158.

anggota organisasinya. Fungsi ini dapat diwujudkan pemimpin dalam menghimpun bahan sebagai masukan apabila akan menetapkan berbagai keputusan penting dan bersifat strategis. Untuk itu pemimpin perlu melakukan konsultasi dengan anggota organisasinya, baik secara terbatas maupun meluas sebelum keputusan ditetapkan. Pemimpin perlu menyimak berbagai persoalan, aspirasi, pendapat, perasaan data, informasi dan lain-lain yang diungkapkan anggota organisasinya.³⁷

Dalam mewujudkan fungsi kepemimpinan, pada tahap pertama mudah terlihat gaya kepemimpinan, yang akan mendasari pengelompokannya menjadi beberapa tiap kepemimpinan, ada tiga pola dasar kepemimpinan yakni:

- Gaya mengutamakan pelaksanaan tugas, gaya ini didasari oleh asumsi bahwa tugas pemimpin adalah mendorong agar setiap anggota melaksanakan tugas masing-masing secara maksimal.
- Gaya mengutamakan kerjasama, gaya ini berpola mementingkan kerjasama, yang berarti juga mengutamakan hubungan manusiawi antara anggota organisasi.
- Gaya mengutamakan hasil, gaya ini berpola mementingkan hasil yang dapat dan harus dicapai setiap anggota organisasi dalam melaksanakan kerja atau kegiatan tertentu.³⁸

³⁷ Hadawi Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 144.

³⁸ Hadawi Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, 153.

Apabila dilihat secara seksama, pada periode I sampai II, ciri yang paling menonjol adalah gaya mengutamakan pelaksanaan tugas. Hal tersebut dikarenakan pada awal berdirinya MUI, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tugas atau fungsi MUI, sehingga setelah MUI resmi didirikan, MUI membuat program yang sifatnya memperkenalkan tugas atau fungsi MUI.

Beberapa aktifitas yang dilakukan ialah dengan adanya koordinasi atau kerjasama dengan berbagai pihak terkait, khususnya dengan lima komponen potensi yang melingkupi MUI yakni:

1. Menjalin hubungan dan kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah serta seluruh jajarannya, utamanya dengan bagian sosial, khususnya Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan wakil Walikota, termasuk para Camat.
2. Menjalin kerjasama dengan kantor Departemen Agama serta segenap jajarannya, sampai dengan tingkat Kecamatan (KUA). Sebab kelahiran MUI tahun 1975 tidak terlepas dari peranan Depag saat itu. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk terus melakukan koordinasi dan kerjasama secara sehat dan berkelanjutan.
3. Menjalin kerjasama dengan ormas Islam, utamanya NU dan Muhammadiyah, sebab keduanya adalah simbol kekuatan umat Islam di Indonesia dan daerah, di samping dengan ormas Islam atau lembaga Islam lainnya.
4. Menjalin kerjasama dan saling membaaur dengan para ulama, zuama dan aghniya' Muslim di daerah, dalam rangka memantapkan potensi umat serta

makin kokohnya persatuan, kesatuan dan kerukunan intern umat Islam di daerah, termasuk dalam usaha pendanaan yang halal.

5. Menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan para pemimpin atau pengasuh pondok pesantren yang ada di daerah, terutama yang punya pengaruh dan memiliki akses dengan kelembagaan Islam dan pemerintah, agar MUI makin potensial dan gerakannya makin solid dan kredibel.³⁹

Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat MUI daerah terdiri dari dewan penasehat, dewan pimpinan harian dan anggota pleno, komisi dan lembaga.

C. Periode III (1988 – 1992)

Periode III ditandai dengan adanya permulaan MUSDA III sampai dengan MUSDA IV yaitu antara 1988 – 1992. Dalam periode ini disebut sebagai periode “Harapan” untuk meneguhkan dan menyeimbangkan kerja yang sudah dicapai pada periode II dengan menyusun rencana kerja yang relevansif dan dilaksanakan menurut program untuk meningkatkan kebaktian. Hal tersebut sejalan dengan adanya dukungan dan harapan DPRD agar MUI mempunyai perpustakaan yang representatif untuk memperbanyak fatwa-fatwa.

Pada periode ini dapat dikatakan sebagai pengenalan dan memasyarakatkan majelis ulama lebih mendalam serta mengembangkan organisasi sampai ke tingkat Kecamatan se-kota Surabaya.

³⁹ Sekretariat MUI kota Surabaya, 14.

MUI kota Surabaya mulai terjun melalui Kecamatan-Kecamatan dengan mendelegasikan setiap Kecamatan dikasih orang dari MUI kota Surabaya, agar lebih muda dipantau. Pada waktu itu kota Surabaya ada 18 Kecamatan beda dengan sekarang yang berkembang menjadi 31 Kecamatan.⁴⁰

Sebelum adanya kantor MUI di setiap Kecamatan, MUI Kecamatan ada yang bertempat pada Kantor Urusan Agama (KUA), kantor Kecamatan dan ada juga yang di masjid. dilihat dari usaha MUI pada periode ini memang sangat bagus karena bisa mengembangkan sebuah wadah buat masyarakat, terutama bagi umat Islam.

Perlu dicatat dan diketahui, bahwa dalam periode ke-III ada beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya Majelis Ulama Indonesia Dati II kota Surabaya, yaitu dengan wafatnya beberapa orang dewan pimpinan dan mutasinya tenaga-tenaga muda karena alih jabatannya, dan tidak kurang pentingnya lagi wafatnya beberapa sesepuh ulama yang duduk dalam Dewan Pertimbangan, termasuk pula wafatnya Kabag KESRA Pemda KOMUNIKASI.

1. Yang telah wafat dari Unsur Dewan Pertimbangan:
 - a. Bapak K.H. Thohir Syamsuddin
 - b. Bapak K.H. Mas Tholhah.
 - c. Bapak K.H. M. Dachlan.
 - d. Bapak K.H. Hamid Syiradj.

⁴⁰ Sukandar, *Wawancara*, Surabaya: 07 Juni, 2009.

2. Yang telah wafat dari Unsur Dewan Pimpinan:
 - a. Bapak K.H. Moenawar Djaelani (72 tahun), Jum'at, tanggal 22 Jumadil Akhir 1410H/19 Januari 1990, ketua umum.
 - b. Bapak KH. Moch. Zubair (63 tahun), tanggal 4 Shafat 1412 H/ 14 Agustus 1992, Ketua III.
3. Mutasi
 - a. Saudara H. Sardi Efendi BA. Sekretaris III, digantikan Saudara Drs. Marsono Adnan.
 - b. Saudara Nuh Mahmudi, SH, Sekretaris V, digantikan oleh Saudara Drs. Slamet Suheri.
4. Kepala Bagian Kesra Pemda Kodya Surabaya

Bapak Drs. H. Alie Prayitno, wafat 30 Mei 1991. walau beliau tidak duduk dalam komposisi kepengurusan, namun besar sekali peranannya dalam melancarkan pengelolaan dana untuk Majelis Ulama Indonesia dati II Kodya Surabaya dari pemerintah daerah.

Dapat dilihat bahwa tenaga-tenaga pelaksanaannya pada umumnya sudah tergolong manula. Sedangkan dana yang sangat minim, padahal program kerjanya begitu tinggi.

Sebagaimana kebiasaan, bahwa setiap organisasi terdapat AD/ART, maka MUI kota Surabaya di sini mempunyai AD/ART karena ulama menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan. Dengan adanya itu, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau disebut sebagai

pedoman dasar dan pedoman rumah tangga disusun. Pada awal berdirinya hingga sekarang, pedoman dasar MUI tidak banyak yang berubah, hanya masalah asas, awal berdirinya, MUI berasaskan Islam kemudian menjadi asas Pancasila dikarenakan ada penyamaan asas. Setelah itu dirubah lagi menjadi asas Islam sejak masa reformasi. Adapun susunan pedoman dasar dan pedoman rumah tangganya lihat pada *lampiran II – III*.